

Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Regional Sumatera

Tezi Asmadia¹, Vicy Andriany², Muhammad Syaiful Sani³

^{1*,2,3}UIN Mahmud Yunus Batusangkar

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 27 April 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 30 Mei 2024

Keywords:

Keywords: (10 pt)

Unemployment, Economic Growth, Inflation, and Poverty.

ABSTRACT (10 pt, times new roman)

The main problem in this reserch is that unemployment, economic growth and inflation influence poverty, but the data found fluctuates. The purpose of this discussion is to analyze how much the unemployment rate, economic growth and inflation influence the poverty level in provinces in the Sumatra region. This type of research is quantitative. The data collection technique used is documentation. The data analysis techniques used in this test are multiple linear regression analysis, classical assumption testing, and hypothesis testing with the help of the SPSS Version 25 program. From the research conducted by researchers, it can be concluded that the unemployment variable has a significant effect on poverty levels. Meanwhile, the variables economic growth and inflation do not have a significant effect on the poverty level. However, based on joint tests, it shows that unemployment, economic growth and inflation do not have a significant effect on the poverty level which is caused by the weak influence of the independent variables on the dependent variable and the presence of other factors that are more influential such as the level of education, health and access to infrastructure.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Corresponding Author:

Tezi Asmadia

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Email: teziasmadia@uinmybatusangkar.ac.id

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh sebagian besar negara di dunia, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Sebagai negara berkembang, persoalan kemiskinan menjadi salah satu isu besar dalam perekonomian Indonesia, seakan-akan menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu (Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, 2018).

Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek kehidupan lainnya seperti aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah utama di Indonesia, karena sifatnya yang multidimensional maka kemiskinan juga membutuhkan solusi dan langkah penanggulangan yang multidimensional pula (Jacobus, E. H., Kindangen, P., &

Walewangko, 2018). Berbagai usaha yang dilakukan baik dari pemerintahan pusat maupun daerah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan sudah dengan berbagai cara, mulai dari program bantuan modal atau uang tunai dan bantuan lainnya. Perlu diketahui bahwasannya yang diperlukan masyarakat tidak hanya bantuan modal/materi, tetapi juga kondisi yang kondusif yang memungkinkan mereka untuk membentuk jaringan sosial dan ekonomi diantara mereka (Purnama, 2017).

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah kapitalisasi Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan masyarakat dan faktor lainnya yang mempengaruhi meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia (Khairiyadi, 2017).

Masalah kemiskinan menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pembangunan ekonomi oleh pemerintah. Pembangunan ekonomi yang pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor perekonomian yang ada, perluasan serapan tenaga kerja, kestabilan harga dan peningkatan taraf hidup (Santika, R., & Juliansyah, 2022). Pemerintah harus bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang bisa diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendapatan dan pendidikan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia (Cahyani, R. D., & Faridatussakam, 2021). Telah banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk mengatasi kemiskinan. Pembangunan nasional merupakan suatu cara perubahan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya dengan tujuan yang diharapkan seperti pengentasan kemiskinan (Anggraini, D., & dkk, 2023).

Pemerintah memahami bahwasannya pembangunan nasional dengan melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta menstabilkan harga barang yang dibutuhkan masyarakat merupakan hal yang mampu memberikan pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan (Didu, S., & Fauzi, 2016). Bahkan untuk mencapai hal tersebut, berbagai program pembangunan yang difokuskan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif memiliki tingkat kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu, terstruktur dan berkesinambungan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masing-masing daerah dengan tujuan untuk mencapai pembangunan nasional yang telah ditetapkan dan direncanakan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek (Purnama, 2017).

Dalam mendorong pengurangan tingkat kemiskinan melalui pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan campur tangan pemerintahan di samping terbukanya campur tangan swasta. Hal ini tidak terlepas juga dari pandangan pemerintahan khususnya pada Pulau Sumatera dalam mengatasi tingkat kemiskinan karena menjadi salah satu pulau di Indonesia dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi sebesar 11,03 persen di tahun 2017 (Septiani, W. T., Zamzami, Z., & Mustika, 2019). Pembangunan nasional yang dilakukan merupakan interaksi beberapa variabel seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan lain-lain. Oleh karena itu, pembangunan nasional tidak terlepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Dimana manusia sebagai tenaga kerja, input pembangunan, serta menjadi konsumen hasil pembangunan itu sendiri (Pangastuti, 2015).

Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam sebuah perekonomian suatu negara karena pengangguran menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas dan pendapatan masyarakat sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah lainnya. Selain tingkat pengangguran yang dapat menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, keberhasilan pembangunan di suatu wilayah juga bisa dilihat dari

kemajuan ekonomi. Secara teoritis meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu sektor akan meningkatkan kesempatan kerja pada sektor tersebut dan mendorong penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut, serta menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada pengurangan angka kemiskinan (Windhyastiti, I., Hidayatullah, S., & Khourouh, 2020).

Bahkan tidak hanya tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, inflasi juga memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan karena inflasi menjadi indikator penting dalam perekonomian. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil menjadi gambaran dari ketidakstabilan perekonomian yang menyebabkan harga barang dan jasa naik secara umum dan berkesinambungan yang menyebabkan naiknya angka kemiskinan. Karena naiknya angka inflasi membuat masyarakat yang awalnya bisa memenuhi barang kebutuhannya, dengan naiknya harga barang dan jasa membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya tersebut sehingga menimbulkan kemiskinan (Vicy A., & Tezi A., 2021).

Beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan telah dilakukan, antara lain Penelitian yang dilakukan oleh Julia Nur Indah Sari dan Ida Nuraini (2020) yang menunjukkan bahwasannya tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi di Pulau Jawa. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Bektu T., Arfida B., dan Muhammad Firmansyah (2023) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2013-2022 dan variabel pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2013-2022. Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Moza Paxia Agwicahya (2021) yang menunjukkan pengangguran berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Pulau Jawa, sedangkan variabel inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Pulau Jawa dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Fritz Alpasha Faisal Pifath (2019) yang menunjukkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Pulau Jawa. Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Ali Akbar, dkk (2022) yang menunjukkan Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2010-2020. Penelitian yang dilakukan oleh Syukron Aziz (2019) yang menunjukkan variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh A.R.G. Gung (2022) menunjukkan bahwasannya variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel pengangguran mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Kalimantan.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang bersifat kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi di Regional Sumatera. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2018-2022 yang diperoleh bersumber dari berbagai institusi pemerintah terutama Badan Pusat Statistik (BPS) pada provinsi di Regional Sumatera dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik Dokumentasi. Teknik atau metode ini dilakukan dengan melihat ataupun menganalisis

dokumen-dokumen (data-data) yang telah ada yaitu menggunakan data *time series* dan data *cross section*. Teknik analisis data dalam penelitian ini statistik deskriptif yang dilakukan untuk menggambarkan data, baik dalam bentuk tabel maupun grafik dengan melakukan uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan SPSS untuk mengetahui hasil penelitian yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian uji kelayakan data dilakukan dengan uji coba. Hasil untuk memperoleh datanya bisa digunakan maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi yang kemudian hasil dari uji asumsi klasik tersebut digunakan sebagai uji prasyarat dalam uji hipotesis. Selanjutnya dilakukan uji regresi linear berganda guna mengetahui hasil akhir atau *output* dari penelitian.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang baik apabila nilai signifikan $> \alpha = 0,05$ maka data tersebut dapat dikatakan normal sedangkan jika nilai signifikan $< \alpha = 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal. Nilai asymp. Sig (2-tailed) yang didapat sebesar 0,082 ($>0,05$) maka kesimpulan data berdistribusi secara normal, karena nilai signifikan yang didapat lebih besar dari 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen dikatakan baik apabila $VIF < 10$ atau tolerance $> 0,01$, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dimana nilai tolerance variable X1 besar dari 0,10 ($0,975 > 0,10$), variable X2 ($0,834 > 0,10$) dan variable X3 ($0,854 > 0,10$), sedangkan nilai VIF variable X1 lebih kecil dari 10,00 ($1,026 < 10,00$), variable X2 ($1,199 < 10,00$) dan variabel X3 ($1,171 < 10,00$). Maka dapat dinyatakan setelah dilakukannya uji multikolinearitas dimana nilai tolerance lebih dari ($> 0,10$) dan VIF kurang dari ($< 10,00$) maka dapat disimpulkan bahwasannya pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap kemiskinan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjerjadi ketidaksamaan varians dari residual dalam suatu pengamatan lainnya. Regresi yang baik adalah regresi yang di dalamnya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan lebih besar dari ($> 0,05$) maka data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Dimana variabel X1 lebih besar dari 0,05 ($0,805 > 0,05$), variabel X2 lebih besar dari 0,05 ($0,872 > 0,05$), dan variabel X3 lebih besar dari 0,05 ($0,997 > 0,05$).

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi atau hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kesalahan periode sebelumnya, yang mana hasilnya langsung olahan SPSS 25 metode cocharance-urcutt. Nilai durbin-watson yang didapat sebesar 1,682 ($> 0,05$) maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala autokorelasi. Diketahui nilai durbin-watson sebesar 1,682 nilai tersebut lebih besar dari DU ($1,6739$) dan lebih kecil dari 4-du ($2,3261$), jadi

$DU < DW < 4-DU = 1,6739 < 1,682 < 2,3261$. Kesimpulannya adalah tidak terjadi autokorelasi.

5. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		l. Error	ta		
(Constant)	196	90		98	0
Pengangguran	4	9	1	06	2
Pert. Ekonomi	2	2	7	7	4
Inflasi	3	1	6	4	5

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh persamaan regresi menggunakan SPSS Versi 25, pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 14.196 + 0.814X_1 + 0.102X_2 + 0.233X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 14.196 menyatakan bahwa saat variabel Tingkat kemiskinan belum dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nilai Koefisien regresi X1 sebesar 0,814, hal ini menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran (X1) mengalami kenaikan 1%, maka Tingkat kemiskinan (Y) akan naik sebesar 0,814. Nilai Koefisien regresi X2 sebesar 0,102, hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X2) mengalami kenaikan 1%, maka Tingkat kemiskinan (Y) akan naik sebesar 0,102. Nilai koefisien regresi X3 sebesar 0,233, hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Inflasi (X3) mengalami kenaikan 1%, maka Tingkat Kemiskinan (Y) akan naik sebesar 0,233 dengan asumsi variabel indenpenden lainnya dianggap konstan.

6. Uji Hipotesis

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh pengangguran (X1) terhadap kemiskinan (Y) adalah $0,032 < 0,05$, dan disamping itu nilai pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan adalah terhadap hubungan yang positif dengan nilai t-hitung $2,206 > t\text{-tabel } 2,0129$ atau signifikan T sebesar 0,032 yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau 5%, maka hasilnya signifikan dan berarti H_01 ditolak dan H_a1 diterima. Artinya, apabila angka pengangguran meningkat, maka angka kemiskinan akan meningkat 2,206. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Julia Nur Indah Sari dan Ida Nuraini (2020) dengan judul "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa", dimana Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh pertumbuhan ekonomi (X2) terhadap kemiskinan (Y) adalah $0,664 > 0,05$, dan disamping itu nilai pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan terdapat hubungan negatif dengan nilai t-hitung $0,437 < t\text{-tabel } 2,0129$ atau signifikan T sebesar 0,664 yang berarti lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau 5%, maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H_02 diterima dan H_a2 ditolak.

Artinya, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat/menurun, maka angka kemiskinan tidak mengalami perubahan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Moza Paxia Agwicahya (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2010-2016”, dimana Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh inflasi (X3) terhadap kemiskinan (Y) adalah $0,485 > 0,05$, dan disamping itu nilai inflasi terhadap kemiskinan terdapat hubungan negatif dengan nilai t-hitung $0,704 < t\text{-tabel } 2,0129$ atau signifikan T sebesar $0,485$ yang berarti lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau 5%, maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H_03 diterima dan H_a3 ditolak. Artinya, apabila inflasi meningkat/menurun, maka angka kemiskinan tidak mengalami perubahan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fritz Alpasha faisal Pifath (2019) dengan judul “Analisis Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2010-2016”, dimana Tingkat Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Sedangkan nilai signifikan secara bersama-sama untuk pengaruh Tingkat Pengangguran (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), dan Inflasi (X3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) pada Provinsi di Regional Sumatera adalah sebesar $0,139$ yang berarti besar dari nilai signifikan ($0,05$) dan nilai F hitung $1,924 < \text{nilai F tabel } 2,806$, maka hal tersebut membuktikan bahwa menerima hipotesis nol (H_04) dan menolak hipotesis alternatif (H_a4). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Ali Akbar, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2010-2020”, dimana Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi secara bersama-sama (simultan) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel diperoleh nilai R square sebesar $0,111$ atau $11,1\%$ variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan sisa persen $88,9\%$ kemiskinan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwasannya mungkin ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan kenapa 3 variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi di Regional Sumatera, yaitu masih terdapatnya ketimpangan ekonomi, tidak sesuainya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja, dan distribusi pendapatan yang belum merata pada setiap provinsi di Pulau Sumatera. Dimana hal tersebut dapat menghambat upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Bahkan, pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2022 telah berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, termasuk di provinsi pada Pulau Sumatra. Pandemi telah menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi, peningkatan pengangguran, dan penurunan pendapatan masyarakat. Hal ini tentu saja memperburuk tingkat kemiskinan di provinsi Pulau Sumatra. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan di provinsi pada Pulau Sumatra, diperlukan upaya yang komprehensif dan sinergis dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Upaya tersebut harus difokuskan pada upaya untuk mengatasi faktor struktural dan eksternal yang menyebabkan kemiskinan.

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan uji parsial dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi di Regional

Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan t_{hitung} dan t_{tabel} dimana t_{hitung} adalah $2,206 > t_{tabel}$ 2,0129 yang menyatakan H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Kuncoro (2018) bahwasanya tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, jika pengangguran meningkat tentu tingkat kemiskinan juga meningkat karena pengangguran menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan menyebabkan mereka mengalami penurunan produktivitas sehingga mereka tidak dapat meningkatkan pendapatannya di masa depan.

Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Julia Nur Indah Sari dan Ida Nuraini (2020) dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa”, dimana Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Sehingga dari pembahasan ini disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan. Semakin tinggi angka pengangguran tentu ini secara positif akan meningkatkan jumlah angka Kemiskinan yang terjadi atau dalam arti lain bahwa Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pengangguran juga secara otomatis akan mengurangi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat yang dapat memiliki efek buruk yaitu mengurangi pendapatan dan tingkat konsumsi yang kemudian akan mengurangi kemakmuran yang ingin dicapai seseorang.

Jadi, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan peluang kerja yang bagus yaitu pada Provinsi Kepulauan Riau karena menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang memiliki potensi di bidang industri, pariwisata, dan perdagangan terutama pada Pulau Batam dan Bintan.

2. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan uji parsial yang peneliti lakukan maka untuk Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, artinya setiap kenaikan atau penurunan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tidak akan mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan t_{hitung} dan t_{tabel} dimana t_{hitung} adalah $0,437 < t_{tabel}$ 2,0129 yang menyatakan H_2 ditolak H_0 diterima.

Ini bertentangan dengan teori yang disampaikan oleh Kuncoro (2018) yang mengatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Dimana hal tersebut terjadi karena pada awal tahun 2020 hampir seluruh negara di dunia terutama Indonesia dilanda oleh wabah covid-19, hal tersebut hampir membuat seluruh aktifitas perekonomian negara indonesia terkhususnya pada provinsi di Pulau Sumatera mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Moza Paxia Agwicahya (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2010-2016”, dimana Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Sehingga dari pembahasan ini disimpulkan bahwa Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi Tingkat Kemiskinan atau dalam arti lain bahwa Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi dengan cara pemberian stimulus ekonomi dan mendorong investasi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia terkhususnya pada provinsi di Pulau Sumatera dapat kembali ke level sebelum pandemi terjadi.

3. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan uji parsial yang peneliti lakukan maka untuk Tingkat Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, artinya setiap

kenaikan atau penurunan Tingkat Inflasi tidak akan mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan t_{hitung} dan t_{tabel} dimana t_{hitung} adalah $0,704 < t_{tabel}$ 2,0129 yang menyatakan H_3 ditolak H_0 diterima.

Dimana hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang disampaikan oleh Kuncoro (2018) yang mengatakan bahwasannya inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Inflasi dapat berpengaruh terhadap kemiskinan jika tingkat inflasi tinggi dan daya beli masyarakat rendah. Namun, jika tingkat inflasi rendah dan daya beli masyarakat rendah juga, maka inflasi tidak akan terlalu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fritz Alpasha faisal Pifath (2019) dengan judul “Analisis Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2010-2016”, dimana Tingkat Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Sehingga dari pembahasan ini disimpulkan bahwa Tingkat Inflasi tidak mempengaruhi Tingkat Kemiskinan atau dalam arti lain bahwa Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

4. **Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan suatu persoalan yang menunjukkan ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya yang paling mendasar dan krusial. Berdasarkan uji simultan yang peneliti lakukan ini bahwasannya Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi secara bersama-sama (simultan) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan F_{hitung} dan F_{tabel} dimana F_{hitung} adalah $1,924 < F_{tabel}$ 2,806 yang menyatakan H_4 ditolak dan H_0 diterima.

Dimana hal ini bertentangan dengan teori yang disampaikan oleh Kuncoro yang mengatakan bahwasannya pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Ali Akbar, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2010-2020”, dimana Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi secara bersama-sama (simultan) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Sehingga dari pembahasan ini disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi secara bersama-sama tidak mempengaruhi Tingkat Kemiskinan atau dalam arti lain bahwa Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwasannya mungkin ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan kenapa 3 variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi di Regional Sumatera, yaitu masih terdapatnya ketimpangan ekonomi, tidak sesuainya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja, dan distribusi pendapatan yang belum merata pada setiap provinsi di Pulau Sumatera. Dimana hal tersebut dapat menghambat upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Bahkan, pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2022 telah berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, termasuk di provinsi pada Pulau Sumatra. Pandemi telah menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi, peningkatan pengangguran, dan penurunan pendapatan masyarakat. Hal ini tentu saja memperburuk tingkat kemiskinan di provinsi Pulau Sumatra. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan di provinsi pada Pulau Sumatra, diperlukan upaya yang komprehensif dan sinergis dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Upaya

tersebut harus difokuskan pada upaya untuk mengatasi faktor struktural dan eksternal yang menyebabkan kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi di Regional Sumatera, dibuktikan dengan uji t dimana $\text{sig} < 0,05$ ($0,032 < 0,05$). Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi di Regional Sumatera, atau dalam kata lain secara signifikan fluktuatif Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi di Regional Sumatera, atau dalam kata lain secara signifikan fluktuatif Tingkat Inflasi tidak mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Sedangkan Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi di regional Sumatera secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi di regional Sumatera.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diajukan adalah untuk Pemerintah Provinsi di Regional Sumatera untuk dapat memerhatikan masalah yang dapat memperparah meningkatnya angka kemiskinan pada Provinsi di Regional Sumatera terkhususnya angka pengangguran. Oleh karena itu pemerintahan harus meningkatkan upaya untuk mengurangi pengangguran di Regional Sumatera dengan salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga angkatan kerja yang ada bisa mengisi lapangan kerja yang tersedia tersebut. Disamping itu, pemerintah tetap harus memerhatikan pertumbuhan ekonomi dan Inflasi, karena ketersediaan lapangan pekerjaan tentu berpatokan kepada kondisi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan baik, semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu daerah tentu secara tidak langsung ketersediaan lapangan pekerjaan juga terpengaruhi yang pada akhirnya dapat menurunkan angka pengangguran.

Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan objek yang berbeda, tidak hanya dari Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi saja tetapi bisa juga dengan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013) 'Teori-Teori Pembangunan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah', in *Graha Ilmu, Yogyakarta*.
- Anggraini, D., Sudharyati, N., Putra, R. A., Ramdhan, N., Putra, M. I. N., & Putra, H.H. (2023) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi Selama Tahun 2017-2021'.
- Beik, I.S.& L.D.A. (2017) 'Ekonomi Pembangunan Syariah, Jakarta':, in *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*
- Cahyani, R. D., & Faridatussakam, S.R. (2021) 'Analisis Kemiskinan di Pulau Sumatera Tahun 2017-2020'.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016) 'Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lebak.', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), pp. 102–117.
- Kuncoro, M. (2018) *Perencanaan Pembangunan Daerah (teori dan aplikasi)*, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purnama, N.I. (2017) 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat

- Kemiskinan Di Sumatera Utara’, *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17(1), pp. 62–70. doi:10.30596/ekonomikawan.v17i1.1181.
- Santika, R. and Juliansyah, H. (2022) ‘PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH BURUH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU SUMATERA’, *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 5(2), p. 43. doi:10.29103/jeru.v5i2.8312.
- Sugiyono (2013) ‘Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah’, in *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Suparmoko (2018) ‘Pengantar Ekonomi Makro, edisi keempat’, *BPFE UGM Yogyakarta* [Preprint].
- Windhyastiti, I., Hidayatullah, S., & Khouruh, U. (2020) ‘Determinan Kunci Dalam Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja Sektor Industri’.